

Investasi, Kinerja, Dan Hasil Publik: Keselarasan Strategis di Kota Banjar

Nanang Suparman

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: nanang.suparman@uinsgd.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari ketidakkonsistenan antara penguatan agenda investasi Kota Banjar dan keterhubungannya dengan hasil ekonomi lokal, sehingga evaluasi kinerja strategis diperlukan melampaui pencapaian indikator investasi. Penelitian bertujuan mengevaluasi *strategic performance alignment* dengan menelusuri hubungan antara sasaran investasi, realisasi, kewirausahaan, ketenagakerjaan, dan hasil ekonomi daerah. Kajian menggunakan perspektif *strategic public management*, *strategic performance management*, dan *policy integration*. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain *longitudinal explanatory single-case study* berbasis analisis dokumen resmi dan data sekunder periode 2020–2025, menggunakan *criterion-based purposive sampling*, analisis tren, pemetaan *target–output–outcome*, serta triangulasi sumber. Hasil menunjukkan *partial strategic alignment* karena arah strategis telah terformalisasi, tetapi hubungan target, realisasi investasi, kualitas pekerjaan, dan hasil ekonomi belum sepenuhnya konsisten. Temuan mengidentifikasi *Investment–Outcome Translation Gap* dan menghasilkan *Integrated Strategic Performance Alignment Framework* sebagai kerangka diagnostik untuk memperkuat integrasi kebijakan, informasi kinerja, dan pembelajaran strategis lintas perangkat daerah. Kerangka ini menempatkan realisasi investasi sebagai *intermediate performance output* pembangunan daerah.

Kata Kunci: Keselarasan Kinerja Strategis; Kinerja Investasi; Hasil Ekonomi Lokal

A. PENDAHULUAN

Realisasi investasi Indonesia sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun, tumbuh 12,7% secara tahunan dan melampaui target pemerintah sebesar Rp1.905,6 triliun (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2026). Capaian tersebut menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja langsung, yang memperlihatkan bahwa investasi secara nasional diposisikan tidak hanya sebagai capaian finansial, tetapi juga sebagai instrumen penciptaan kesempatan kerja (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2026). Pada Agustus 2025, jumlah penduduk bekerja di Indonesia mencapai 146,54 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,85%, turun 0,06 poin persentase dibandingkan Agustus 2024 (Badan Pusat Statistik, 2025). Pada skala lokal, Kota Banjar mencatat 109.360 penduduk bekerja dan TPT sebesar 5,26% pada Agustus 2025, tetapi pekerja pada kegiatan formal hanya mencapai 41.554 orang atau 38,00% dari total penduduk bekerja (Badan Pusat Statistik Kota Banjar, 2025). Konstelasi tersebut menempatkan hubungan antara pencapaian investasi dan hasil ketenagakerjaan sebagai persoalan kinerja strategis, sebab peningkatan aktivitas ekonomi belum dengan sendirinya menjelaskan kualitas transformasi ekonomi yang dihasilkan pada tingkat daerah.

Penelitian mengenai perencanaan strategis sektor publik menunjukkan bahwa efektivitas strategi tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan dokumen perencanaan, karena proses strategis bersifat kontekstual, iteratif, dan membutuhkan keterhubungan antara formulasi, implementasi, evaluasi, serta pembelajaran organisasi (Vandersmissen & George, 2024). Bukti dari 101 pemerintah kota di Flanders juga memperlihatkan bahwa perencanaan strategis berhubungan secara tidak langsung dengan persepsi kinerja manajer dan warga

melalui penguatan hubungan eksternal, sehingga mekanisme yang menghubungkan strategi dengan hasil menjadi lebih penting daripada sekadar keberadaan rencana formal (Vandersmissen, George, & Voets, 2024). Dalam konteks Kota Banjar, Renstra DPMPTSP 2024–2026 menempatkan peningkatan investasi sebagai sasaran strategis sekaligus mengidentifikasi pariwisata, UMKM, perdagangan, dan sektor ekonomi lainnya sebagai ruang pengembangan penanaman modal daerah (Pemerintah Kota Banjar, 2024). Perubahan RKPD Kota Banjar Tahun 2025 juga memasukkan transformasi usaha mikro menjadi wirausaha sebagai indikator program ekonomi, yang menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan diarahkan melampaui nilai investasi semata menuju penguatan kapasitas ekonomi lokal (Pemerintah Kota Banjar, 2025). Koeksistensi sasaran investasi, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan tersebut menjadikan Kota Banjar relevan untuk menilai apakah agenda pembangunan ekonomi telah tersusun sebagai rantai kinerja yang menghubungkan tujuan strategis dengan hasil publik secara konsisten.

Pada tingkat daerah, persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan agenda investasi, melainkan pada belum terlihatnya rantai kinerja strategis yang menghubungkan sasaran penanaman modal dengan hasil ekonomi publik secara utuh. Penetapan 2025 sebagai Tahun Investasi memperkuat orientasi pemerintah pada peningkatan aktivitas penanaman modal, sedangkan kualitas pekerjaan, penguatan kewirausahaan, dan manfaat ekonomi lokal berada dalam domain program yang dikelola oleh perangkat daerah yang berbeda. Fragmentasi tersebut berpotensi membuat keberhasilan pada tingkat program atau organisasi dibaca sebagai keberhasilan strategi kota tanpa pengujian yang memadai terhadap perubahan hasil pembangunan yang seharusnya dihasilkan. Perbaikan indikator ketenagakerjaan juga belum otomatis menunjukkan keselarasan strategis apabila perubahan kuantitas pekerjaan tidak dianalisis bersama struktur pekerjaan, kapasitas kewirausahaan, realisasi investasi, dan kinerja ekonomi daerah. Persoalan inti Kota Banjar dengan demikian terletak pada derajat *strategic performance alignment* antara tujuan strategis, implementasi kebijakan, capaian investasi, dan hasil ekonomi lokal.

Penelitian terdahulu memperlihatkan kecenderungan kuat untuk mengkaji manajemen strategis, sistem pengukuran kinerja, dan pengelolaan investasi sebagai domain yang berhubungan, tetapi sering dianalisis pada tingkat organisasi atau mekanisme tertentu secara terpisah. Johnsen, Solholm, dan Tufte (2024), melalui *PLS path modeling* terhadap 135 organisasi sektor publik di Norwegia, menemukan bahwa perencanaan strategis formal dan *logical incrementalism* berhubungan positif dengan desain sistem pengukuran kinerja, sedangkan desain sistem tersebut menjadi penghubung utama antara formulasi strategi dan penggunaan informasi kinerja. Axelsson dan Höglund (2024), melalui studi kasus kualitatif pada Swedish Transport Administration, menunjukkan bahwa implementasi strategi publik menghadapi ketegangan antara strategi yang direncanakan dan yang muncul secara adaptif, legitimasi dan kepraktisan, pengendalian administratif dan inovasi, serta aksesibilitas dan keamanan. Nulhakim, Arumi S, Hilda, Maghfirotn, dan Sudrajat (2025), melalui studi kasus DPMPTSP Kota Banjar, menemukan bahwa digitalisasi OSS telah mendukung peran administratif, tetapi koordinasi antar perangkat daerah dan keterbatasan sumber daya masih menjadi kendala, sedangkan promosi investasi cenderung pasif dan layanan *aftercare* belum terstruktur secara jangka panjang. Ketiga penelitian tersebut menegaskan pentingnya keterhubungan strategi, kapasitas implementasi, dan pengukuran kinerja, tetapi belum memberikan penjelasan terpadu mengenai bagaimana agenda investasi pemerintah daerah bergerak dari target strategis menuju capaian investasi dan selanjutnya diterjemahkan menjadi hasil ekonomi publik.

Penelitian yang dikembangkan memiliki persamaan dengan kajian terdahulu dalam menempatkan strategi sebagai proses yang keberhasilannya ditentukan oleh hubungan antara formulasi, implementasi, pengukuran, dan hasil organisasi publik. Kesamaan lainnya terletak

pada perhatian terhadap kapasitas institusional pemerintah daerah, informasi kinerja, dan implementasi strategi sebagai mekanisme yang dapat memperkuat atau melemahkan pencapaian sasaran pembangunan. Perbedaan utamanya adalah penelitian ini tidak berhenti pada proses perencanaan strategis, desain sistem pengukuran kinerja, ataupun kemampuan DPMPTSP dalam menarik investor, tetapi merekonstruksi hubungan antara sasaran investasi, pelaksanaan strategi, realisasi investasi, kewirausahaan, ketenagakerjaan, dan hasil ekonomi daerah sebagai satu rantai kinerja. Penelitian juga menggunakan pendekatan studi kasus eksplanatoris longitudinal berbasis data sekunder dan *open data* periode 2020–2025 untuk membandingkan perkembangan indikator lintas waktu dan lintas fungsi pemerintah daerah, berbeda dari studi survei organisasi maupun studi kasus satu perangkat daerah. Perbedaan tersebut membentuk ruang analitis untuk menjelaskan apakah pencapaian indikator investasi benar-benar sejalan dengan hasil pembangunan ekonomi yang menjadi tujuan strategis pemerintah daerah.

Perkembangan empiris Kota Banjar dan fragmentasi literatur menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas strategis atau pencapaian indikator investasi belum cukup untuk menjelaskan apakah suatu strategi pembangunan ekonomi menghasilkan konfigurasi hasil publik yang konsisten. Kesenjangan penelitian yang paling dominan adalah *evidence gap*, yaitu keterbatasan bukti yang secara terpadu menghubungkan tujuan strategis investasi, capaian implementasi, dan perkembangan hasil ekonomi pada tingkat pemerintah daerah. Kesenjangan tersebut relevan karena penelitian terdahulu telah menyediakan bukti mengenai pentingnya desain sistem kinerja, dinamika implementasi strategi, dan keterbatasan kelembagaan pengelolaan investasi, tetapi bukti-bukti tersebut masih berdiri pada unit analisis serta tahapan strategi yang berbeda. Kajian yang dipetakan belum menjelaskan secara memadai apakah keberhasilan pada indikator antara, khususnya realisasi investasi, konsisten dengan perubahan pada kewirausahaan, kesempatan kerja, struktur pekerjaan, dan kinerja ekonomi daerah dalam satu kerangka *target–output–outcome*. Penelitian ini memposisikan diri untuk mengisi *evidence gap* tersebut dengan mengevaluasi *strategic performance alignment* sepanjang rantai kinerja pembangunan ekonomi Kota Banjar.

Urgensi penelitian muncul dari kebutuhan untuk menilai agenda investasi Kota Banjar berdasarkan hasil pembangunan yang dihasilkan, bukan semata-mata berdasarkan kemampuan pemerintah memenuhi indikator penanaman modal. Tanpa analisis tersebut, kajian manajemen strategis sektor publik berisiko mempertahankan pemisahan antara perencanaan, pengukuran kinerja, dan hasil pembangunan sehingga mekanisme yang menjelaskan keberhasilan atau kegagalan strategi daerah tetap kabur. Pada tingkat praktis, penekanan yang terlalu besar terhadap realisasi investasi sebagai indikator akhir dapat mendorong pencapaian target administratif tanpa memastikan bahwa penanaman modal menghasilkan perluasan pekerjaan berkualitas, penguatan kewirausahaan, dan kapasitas ekonomi lokal. Persoalan ini berkaitan langsung dengan DPMPTSP, perangkat daerah bidang ketenagakerjaan, perangkat daerah bidang UMKM dan perdagangan, badan perencanaan pembangunan, serta pemerintah kota sebagai pengelola keseluruhan portofolio strategi pembangunan ekonomi. Periode 2020–2025 menjadi konteks yang relevan karena memungkinkan evaluasi perkembangan sebelum dan selama penguatan agenda investasi sekaligus menangkap hasil ketenagakerjaan dan ekonomi terbaru yang tersedia secara terbuka.

Unsur pembeda utama penelitian terletak pada pergeseran unit evaluasi dari pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah menarik investasi menuju pertanyaan yang lebih strategis mengenai apakah kinerja investasi diterjemahkan menjadi hasil ekonomi lokal yang konsisten. Secara konseptual, penelitian mengoperasionalkan *strategic performance alignment* sebagai keterhubungan antara tujuan strategis, indikator kinerja, implementasi, keluaran antara, hasil pembangunan, dan umpan balik kinerja dalam satu rantai analitis

pemerintah daerah. Secara empiris, penelitian mengintegrasikan rangkaian data resmi 2020–2025 mengenai investasi, kewirausahaan, ketenagakerjaan, dan kinerja ekonomi untuk membangun pembacaan longitudinal yang melampaui evaluasi terhadap satu program atau satu perangkat daerah. Secara praktis, hasil penelitian dapat menyediakan peta diagnostik mengenai titik yang selaras maupun terputus dalam rantai kinerja sehingga koordinasi antar fungsi, pemilihan indikator, dan penetapan target pembangunan ekonomi dapat diarahkan pada hasil publik yang lebih substantif. Nilai tambah penelitian terletak pada penempatan realisasi investasi sebagai keluaran antara yang keberhasilannya perlu dinilai berdasarkan kemampuan strategi pemerintah mengubahnya menjadi kesempatan ekonomi dan kinerja pembangunan daerah.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi *strategic performance alignment* pembangunan ekonomi Kota Banjar dengan menganalisis keterhubungan antara sasaran investasi, implementasi dan realisasi investasi, perkembangan kewirausahaan dan ketenagakerjaan, serta hasil ekonomi daerah selama periode 2020–2025. Penelitian juga mengidentifikasi titik keselarasan dan ketidakselarasan dalam rantai *target–output–outcome* untuk menjelaskan sejauh mana agenda investasi daerah diterjemahkan menjadi hasil pembangunan ekonomi lokal.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen Publik Strategis

Strategic public management memandang strategi sektor publik sebagai proses berkelanjutan untuk menetapkan prioritas, merespons perubahan lingkungan, mengarahkan sumber daya, dan memastikan tujuan publik diterjemahkan ke dalam tindakan organisasi, bukan sekadar menghasilkan dokumen perencanaan (Poister, 2010). Pendekatan ini menempatkan formulasi dan implementasi strategi dalam satu rangkaian manajerial sehingga agenda strategis harus dikelola secara terus-menerus dan disesuaikan ketika kondisi internal maupun eksternal berubah (Poister, 2010). Kinerja menjadi bagian integral dari proses tersebut karena informasi mengenai capaian program diperlukan untuk menilai apakah strategi yang dijalankan benar-benar mengarah pada tujuan organisasi publik (Poister, 2010). Dalam konteks pemerintah daerah, perspektif ini memungkinkan agenda investasi dipahami sebagai strategi publik yang membutuhkan keselarasan antara prioritas pembangunan, pengalokasian sumber daya, pelaksanaan program, dan pencapaian hasil ekonomi. Strategic public management karena itu menjadi landasan untuk mengevaluasi apakah strategi investasi Kota Banjar bergerak secara konsisten dari tujuan strategis menuju implementasi dan hasil pembangunan daerah. Indikator:

- Arah dan prioritas strategis
- Analisis lingkungan strategis
- Formulasi strategi
- Implementasi strategi
- Keselarasan sumber daya
- Pemantauan kinerja
- Umpan balik dan pembelajaran strategis

Manajemen Kinerja Strategis

Strategic performance management menekankan keterhubungan sistematis antara formulasi strategi, desain sistem pengukuran kinerja, penggunaan informasi kinerja, dan pencapaian tujuan organisasi sektor publik (Johnsen et al., 2024). Sistem pengukuran kinerja dalam perspektif ini tidak berfungsi hanya sebagai mekanisme pelaporan administratif, tetapi menjadi penghubung yang memungkinkan organisasi menerjemahkan strategi ke dalam target, indikator, evaluasi, dan keputusan manajerial (Johnsen et al., 2024). Bukti empiris pada organisasi sektor publik menunjukkan bahwa desain sistem pengukuran kinerja

memainkan peran penting dalam menghubungkan proses formulasi strategi dengan penggunaan informasi kinerja secara purposif untuk implementasi dan evaluasi strategi (Johnsen et al., 2024). Perspektif tersebut menggeser evaluasi keberhasilan dari sekadar pencapaian output menuju pemeriksaan apakah target strategis menghasilkan outcome publik yang memang ingin dicapai. Dalam penelitian Kota Banjar, pendekatan ini digunakan untuk menilai keterhubungan antara target investasi, realisasi investasi, perkembangan kewirausahaan dan ketenagakerjaan, serta hasil ekonomi lokal sebagai satu rantai target–output–outcome. Indikator:

- Kejelasan tujuan strategis
- Kesesuaian indikator kinerja
- Keselarasan target dan capaian
- Hubungan output–outcome
- Penggunaan informasi kinerja
- Monitoring dan evaluasi
- Umpan balik untuk perbaikan strategi

Integrasi Kebijakan

Policy integration menjelaskan proses penyelarasan berbagai domain kebijakan yang saling berhubungan dalam menangani persoalan publik lintas sektor yang tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi atau satu instrumen kebijakan secara terpisah (Candel & Biesbroek, 2016). Integrasi kebijakan bersifat multidimensional dan dapat berkembang secara tidak seragam karena beberapa dimensinya dapat mengalami peningkatan integrasi ketika dimensi lainnya tetap terfragmentasi atau bahkan bergerak ke arah yang berbeda (Candel & Biesbroek, 2016). Kerangka Candel dan Biesbroek membedakan empat dimensi utama integrasi, yaitu policy frame, keterlibatan subsistem, tujuan kebijakan, dan instrumen kebijakan (Candel & Biesbroek, 2016). Perspektif ini relevan ketika keberhasilan strategi pembangunan ekonomi bergantung pada keterhubungan fungsi investasi, ketenagakerjaan, kewirausahaan, perdagangan, dan perencanaan pembangunan yang secara administratif berada pada perangkat daerah berbeda. Dalam penelitian Kota Banjar, *policy integration* digunakan untuk menilai apakah agenda investasi dan hasil ekonomi dikelola dalam satu konfigurasi strategis yang koheren atau masih terbagi ke dalam sasaran dan indikator sektoral yang berjalan secara paralel. Indikator:

- Kerangka kebijakan
- Keterlibatan subsistem
- Keselarasan tujuan kebijakan
- Keselarasan instrumen kebijakan

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan *desain longitudinal explanatory single-case study* untuk mengevaluasi *strategic performance alignment* pembangunan ekonomi Kota Banjar selama 2020–2025, karena desain studi kasus memungkinkan analisis mendalam terhadap keterhubungan proses, kebijakan, dan hasil dalam konteks institusional yang nyata serta sesuai untuk menjelaskan mekanisme yang membentuk suatu fenomena publik (Yin, 2018). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen terhadap RPJPD/RKPD, Renstra dan dokumen kinerja perangkat daerah, data DPMPTSP, BPS Kota Banjar, Open Data Kota Banjar, serta data investasi LKPM/OSS yang memuat sasaran strategis, realisasi investasi, kewirausahaan, ketenagakerjaan, dan kinerja ekonomi, karena analisis dokumen memungkinkan informasi kebijakan dan bukti administratif diperiksa secara sistematis sebagai sumber data penelitian kualitatif (Bowen, 2009). Teknik sampling menggunakan *criterion-based purposive* sampling dengan memilih dokumen dan dataset resmi yang berlaku atau diterbitkan pada periode penelitian, berkaitan

langsung dengan pembangunan ekonomi Kota Banjar, memiliki sumber serta definisi indikator yang dapat diverifikasi, dan menyediakan bukti mengenai *tahapan target–output–outcome*, sejalan dengan *prinsip purposeful* sampling yang mengutamakan sumber daya informasi berdasarkan relevansinya terhadap fenomena penelitian (Palinkas et al., 2015). Data dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan, yang dipadukan dengan perbandingan lintas dokumen dan analisis tren longitudinal untuk memetakan perubahan indikator ke dalam matriks hubungan antara tujuan strategis, implementasi, realisasi investasi, kewirausahaan dan ketenagakerjaan, serta hasil ekonomi daerah (Miles et al., 2020). Validitas interpretasi diperkuat melalui triangulasi antara sumber resmi dan pemeriksaan konsistensi definisi indikator, kemudian bukti diklasifikasikan sebagai *aligned*, *partially aligned*, atau *disconnected* untuk mengidentifikasi titik keselarasan dan keterputusan dalam rantai kinerja strategis pembangunan ekonomi Kota Banjar.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keselarasan Arah Strategis dan Kinerja Investasi di Kota Banjar

Hasil penelusuran dokumen kinerja menunjukkan bahwa realisasi investasi Kota Banjar bergerak dari Rp159,70 miliar pada 2020 menjadi Rp394,70 miliar pada 2021 dan Rp455,73 miliar pada 2022, dengan pertumbuhan 15,46% pada tahun terakhir periode tersebut (Pemerintah Kota Banjar, 2024). Nilai tersebut kemudian turun menjadi sekitar Rp264,66 miliar pada 2023 dan Rp142,44 miliar pada 2024, sebelum kembali meningkat secara moderat menjadi sekitar Rp154,26 miliar pada 2025 berdasarkan seri administratif investasi daerah yang digunakan dalam penelitian. Renstra DPMPTSP 2024–2026 menetapkan realisasi investasi sebagai indikator sasaran peningkatan iklim investasi dengan target nominal Rp500 miliar pada 2024, Rp550 miliar pada 2025, dan Rp 600 miliar pada 2026 (Pemerintah Kota Banjar, 2024). Orientasi tersebut diperkuat oleh penempatan investasi sebagai salah satu agenda pembangunan ekonomi daerah, tetapi capaian 2024 dan 2025 masih berada jauh di bawah target nominal yang telah ditetapkan. Perbedaan antara penguatan komitmen strategis dan perkembangan capaian aktual menunjukkan bahwa evaluasi kinerja investasi perlu diarahkan pada hubungan antara strategic intent, arsitektur target, dan kemampuan menerjemahkannya menjadi hasil yang terukur.

Tabel 1. Target Strategis dan Kinerja Investasi di Kota Banjar, 2020–2025

Tahun	Realisasi Investasi (Rp miliar)	Perubahan Tahunan	Target Strategis (Rp miliar)	Capaian terhadap Target	Posisi Kinerja
2020	159,70	–	–	–	Basis awal periode
2021	394,70	+147,14%	–	–	Ekspansi kuat
2022	455,73	+15,46%	–	–	Pertumbuhan berlanjut
2023	264,66	–41,93%	–	–	Kontraksi
2024	142,44	–46,18%	500,00	28,49%	Di bawah target
2025	154,26	+8,30%	550,00	28,05%	Pemulihan terbatas

Sumber: diolah dari data administratif realisasi investasi DPMTSP Kota Banjar, Renstra DPMTSP Kota Banjar 2024–2026, dan dokumen perencanaan daerah tahun 2025.

Pola pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa peningkatan prioritas investasi tidak menghasilkan lintasan kinerja yang stabil sepanjang periode penelitian. Lonjakan realisasi pada 2021–2022 diikuti dua tahun kontraksi yang secara kumulatif membawa nilai investasi 2024 jauh di bawah posisi 2022. Pemulihan pada 2025 menunjukkan adanya pembalikan arah, tetapi besarnya belum cukup untuk mengimbangi penurunan dua tahun sebelumnya maupun mendekati target strategis tahunan. Kondisi tersebut menandakan bahwa keberadaan target yang semakin tinggi belum sepenuhnya diikuti oleh kapasitas implementasi yang mampu mempertahankan momentum investasi secara konsisten. Hubungan yang tidak linear antara ambisi kebijakan dan pencapaian aktual menempatkan desain serta penggunaan sistem kinerja sebagai faktor penting untuk menjelaskan bagaimana strategi investasi diterjemahkan pada tingkat operasional.

Temuan tersebut sejalan dengan Johnsen, Solholm, dan Tufte yang menunjukkan bahwa formulasi strategi tidak secara langsung menjamin penggunaan informasi kinerja, sedangkan desain sistem pengukuran kinerja berperan sebagai penghubung penting antara strategi dan implementasinya (Johnsen et al., 2024). Studi pemerintah lokal juga menunjukkan bahwa pergeseran dari pengukuran output menuju pengelolaan outcome masih menghadapi kelemahan pada kematangan sistem pengukuran dan penggunaan benchmarking secara konsisten (Rivenbark, 2025). Penelitian terhadap pemerintah kota memperlihatkan bahwa perencanaan strategis formal dapat mendorong kolaborasi lintas sektor, tetapi pengaruh tersebut bergantung pada cara strategi diformulasikan dan hubungan kelembagaan yang dibangun selama implementasi (Hong & Jimenez, 2024). Bukti terbaru dari organisasi sektor publik Indonesia menunjukkan bahwa tujuan yang jelas dan mekanisme umpan balik membutuhkan sistem manajemen kinerja yang efektif agar dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kinerja organisasi (Kurnianto et al., 2026). Kajian komparatif pada Indonesia dan Brasil juga menemukan bahwa penggunaan manajemen program strategis tidak berlangsung merata dan menguat ketika akuntabilitas kinerja manajerial mampu menjaga arah program terhadap tujuan yang telah ditetapkan (Berman et al., 2025).

Konfigurasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan investasi Kota Banjar lebih tepat dibaca sebagai persoalan penerjemahan kinerja daripada sekadar rendah atau tingginya nilai investasi tahunan. Pemerintah daerah telah *membentuk strategic commitment* yang relatif eksplisit melalui sasaran peningkatan iklim investasi, indikator realisasi investasi, serta target nominal yang meningkat dari tahun ke tahun. Capaian aktual memperlihatkan bahwa *hubungan strategic intent–target–realization* belum membentuk pola yang sepenuhnya selaras karena peningkatan ambisi target berlangsung bersamaan dengan kontraksi realisasi pada fase awal periode RPD. Posisi ini mencerminkan *partial strategic alignment*, sebab arah kebijakan telah terdefinisi tetapi kemampuan mempertahankan pencapaian aktual masih berfluktuasi dan belum sebanding dengan target yang dibangun. Pemaknaan terhadap capaian investasi karena itu perlu bergerak dari pertanyaan mengenai keberhasilan memenuhi target menuju penilaian mengenai manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh investasi tersebut.

Realisasi investasi dalam konfigurasi ini berfungsi *sebagai intermediate performance output* yang menghubungkan agenda pembangunan dengan perubahan ekonomi yang lebih substantif. Nilai investasi yang tinggi hanya menunjukkan aktivitas penanaman modal apabila tidak diikuti bukti mengenai pembentukan usaha, perluasan pekerjaan, dan peningkatan kapasitas ekonomi lokal. Penurunan realisasi juga tidak dapat langsung dibaca sebagai kegagalan pembangunan apabila indikator ketenagakerjaan atau pertumbuhan ekonomi memperlihatkan arah yang berbeda. Evaluasi strategis karena itu memerlukan pembacaan lintas indikator yang mampu membedakan pencapaian administratif dari

perubahan outcome yang dialami perekonomian daerah. Hubungan antara investasi, kewirausahaan, kesempatan kerja, formalitas pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi menjadi dasar untuk menentukan apakah investment performance Kota Banjar benar-benar diterjemahkan menjadi local economic outcomes yang konsisten.

2. Menerjemahkan Keluaran Investasi menjadi Ketenagakerjaan dan Hasil Ekonomi Lokal

Seri kinerja investasi menunjukkan bahwa realisasi investasi Kota Banjar turun dari Rp455,73 miliar pada 2022 menjadi Rp264,66 miliar pada 2023 dan Rp142,44 miliar pada 2024, kemudian pulih terbatas menjadi Rp154,26 miliar pada 2025. Jumlah penduduk bekerja justru meningkat dari 89.588 orang pada 2022 menjadi 103.010 orang pada 2023 ketika realisasi investasi mulai mengalami kontraksi (Badan Pusat Statistik Kota Banjar, 2024). Jumlah penduduk bekerja kembali meningkat menjadi 109.360 orang pada 2025, sedangkan TPT turun dari 5,44% pada 2024 menjadi 5,26% pada 2025 (Badan Pusat Statistik Kota Banjar, 2025). Struktur pekerjaan menunjukkan pola berbeda karena publikasi BPS mencatat 41.554 pekerja formal atau 38,00% dari total penduduk bekerja pada 2025, sehingga peningkatan jumlah pekerja tidak secara otomatis mencerminkan penguatan formalitas pekerjaan (Badan Pusat Statistik Kota Banjar, 2025). Perekonomian Kota Banjar tetap tumbuh positif dan mencapai 5,13% pada 2025 setelah mencatat pertumbuhan 5,47% pada 2024, yang memperlihatkan bahwa perubahan investasi, ketenagakerjaan, dan pertumbuhan ekonomi tidak bergerak dengan pola temporal yang sepenuhnya seragam (Badan Pusat Statistik Kota Banjar, 2026).

Konfigurasi indikator tersebut memperlihatkan bahwa kontraksi investasi tidak diikuti kontraksi kesempatan kerja pada periode yang sama. Peningkatan penduduk bekerja dan penurunan pengangguran menunjukkan perbaikan pada dimensi kuantitas pekerjaan, tetapi perubahan formalitas pekerjaan menunjukkan bahwa kualitas struktur ketenagakerjaan tidak mengikuti arah yang sama. Pertumbuhan ekonomi yang tetap positif ketika realisasi investasi mengalami penurunan juga menunjukkan bahwa kinerja ekonomi daerah bekerja melalui mekanisme yang lebih luas daripada nilai penanaman modal tahunan. Perbedaan arah dan kecepatan perubahan tersebut melemahkan asumsi bahwa kenaikan atau penurunan investasi akan secara langsung menghasilkan perubahan yang proporsional pada seluruh indikator ekonomi lokal. Keselarasan kinerja karena itu perlu dinilai melalui hubungan output–outcome yang mempertimbangkan kuantitas pekerjaan, struktur pekerjaan, kapasitas kewirausahaan, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan.

Penelitian Chen et al. menunjukkan bahwa deregulasi investasi asing dapat meningkatkan penciptaan pekerjaan melalui ekspansi perusahaan yang telah beroperasi dan masuknya perusahaan baru, sehingga investasi memang dapat membentuk kapasitas ketenagakerjaan ketika mekanisme transmisinya bekerja secara efektif (Chen et al., 2024). Studi terhadap lebih dari 3.900 pemerintah kota di Spanyol justru menemukan bahwa pekerjaan yang muncul dari investasi energi terbarukan tidak selalu bertahan pada wilayah penerima investasi dan besarnya dampak lokal berbeda menurut teknologi, skala, serta fase proyek (Fabra et al., 2024). Temuan di Indonesia memperlihatkan bahwa perubahan regulasi FDI dapat menghasilkan peningkatan employment melalui efek langsung dan restrukturisasi rantai produksi, tetapi peningkatan tersebut tidak otomatis menghasilkan perbaikan kesejahteraan ekonomi lokal (Gehrke et al., 2025). Analisis kebijakan regional di Eropa juga menunjukkan heterogenitas dampak investasi publik terhadap employment dan produktivitas, sehingga penciptaan pekerjaan dan peningkatan kualitas kinerja ekonomi tidak selalu bergerak sebagai outcome yang identik (Bourdin et al., 2025). Hubungan investasi dengan kewirausahaan domestik bahkan bergantung pada konfigurasi institusi, kapasitas logistik, dan infrastruktur digital yang menentukan kemampuan perekonomian lokal menyerap serta mentransformasikan investasi menjadi aktivitas usaha baru (Luu et al., 2024).

Pola Kota Banjar mengindikasikan adanya *Investment–Outcome Translation Gap*, yaitu ketidaksepadanan antara *perubahan investment output* dan *perubahan hasil pembangunan ekonomi* yang berlangsung pada periode yang sama. Kontraksi realisasi investasi pada 2023–2024 berlangsung bersamaan dengan bertambahnya penduduk bekerja dan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, sedangkan penguatan kuantitas pekerjaan tidak diikuti pola formalitas pekerjaan yang sama kuatnya. Konfigurasi tersebut menunjukkan bahwa keterhubungan investasi dengan hasil ekonomi bersifat tidak langsung, berbeda dalam jeda waktu, dan tidak seragam pada *setiap dimensi outcome*. Realisasi investasi karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai proksi tunggal keberhasilan pembangunan maupun sebagai penjelas mekanis atas *perubahan employment* dan pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan ini memperlihatkan *partial strategic alignment* yang ditandai oleh keselarasan pada sebagian outcome kuantitatif tetapi disertai ketidaksepadanan temporal dan kualitatif dalam proses penerjemahan investasi menjadi hasil ekonomi lokal.

Investment–Outcome Translation Gap menempatkan realisasi investasi sebagai keluaran antara yang membutuhkan kapasitas institusional lintas fungsi agar dapat diterjemahkan menjadi manfaat publik yang lebih luas. DPMPTSP mengelola penciptaan iklim dan realisasi investasi, sementara pembentukan pekerjaan, pengembangan wirausaha, penguatan UMKM, dan pengelolaan pembangunan ekonomi melibatkan fungsi organisasi daerah yang berbeda. Pencapaian indikator pada masing-masing perangkat daerah dapat menunjukkan kinerja sektoral yang positif tanpa secara otomatis menghasilkan *rantai target–output–outcome* yang konsisten pada tingkat pemerintah kota. Sistem kinerja strategis memerlukan sasaran lintas fungsi, indikator outcome yang saling terhubung, penggunaan informasi kinerja bersama, dan mekanisme umpan balik yang mampu mengoreksi ketidaksambungan antarhasil. Kapasitas tersebut menentukan apakah kinerja sektoral Kota Banjar tetap berjalan secara paralel atau membentuk *integrated strategic performance alignment* yang menghubungkan investasi, kewirausahaan, ketenagakerjaan, dan hasil ekonomi sebagai satu sistem pembangunan.

3. Dari Kinerja Sektoral menuju Keselarasan Kinerja Strategis Terintegrasi

Hasil pemetaan keseluruhan menunjukkan bahwa sistem kinerja pembangunan ekonomi Kota Banjar membentuk derajat keselarasan yang berbeda pada setiap tahapan rantai target–output–outcome. Arah strategis investasi telah diterjemahkan ke dalam target formal, tetapi realisasi investasi 2024 dan 2025 masing-masing hanya mencapai sekitar 28,49% dan 28,05% dari target tahunan yang ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP. Perkembangan outcome menunjukkan pola yang lebih positif karena TPT turun menjadi 5,26% pada 2025 dan pertumbuhan ekonomi tetap mencapai 5,13%, meskipun realisasi investasi belum kembali pada posisi tertinggi periode penelitian. Struktur pekerjaan memperlihatkan dimensi yang berbeda karena pekerja formal hanya mencakup 38,00% dari total penduduk bekerja pada 2025, sehingga peningkatan kuantitas pekerjaan belum sepenuhnya diikuti penguatan struktur pekerjaan formal. Konfigurasi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan sektoral pada investasi, ketenagakerjaan, dan pertumbuhan ekonomi belum membentuk keselarasan yang seragam ketika seluruh indikator ditempatkan dalam satu rantai kinerja strategis.

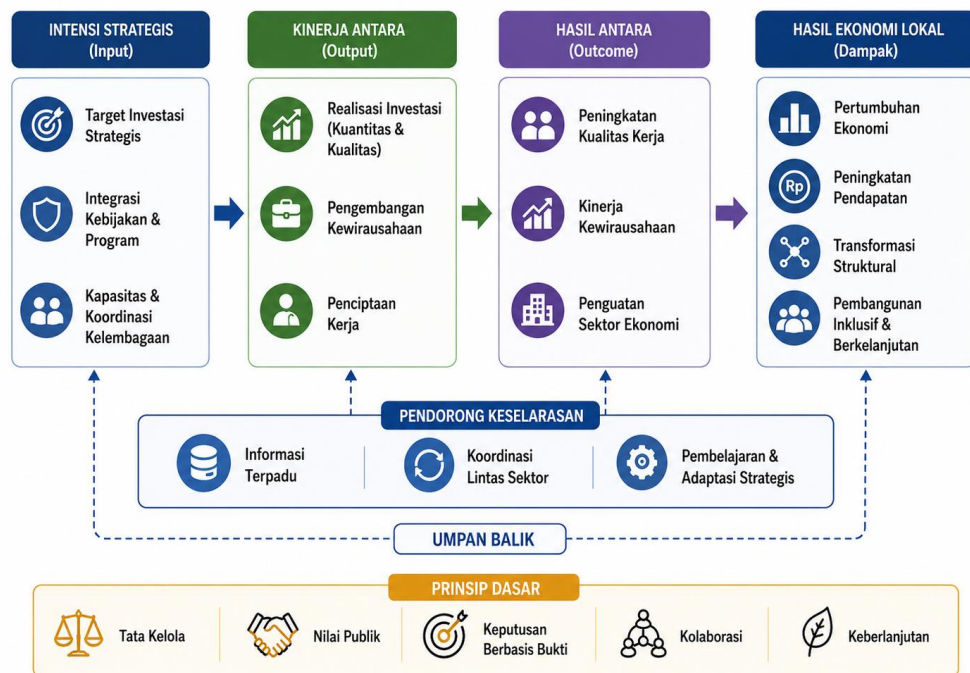
Pola tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada ketiadaan strategi maupun tidak tercapainya seluruh outcome, tetapi pada keterhubungan yang belum utuh antara setiap tahapan kinerja. Pemerintah dapat mencapai perbaikan ketenagakerjaan ketika realisasi investasi mengalami kontraksi karena masing-masing indikator dipengaruhi oleh program, sektor ekonomi, kapasitas kelembagaan, dan jeda waktu yang berbeda. Kondisi ini membuat keberhasilan suatu perangkat daerah tidak dapat langsung diperlakukan sebagai bukti keberhasilan keseluruhan strategi pembangunan ekonomi kota. Sistem pengukuran yang tetap tersegmentasi berdasarkan kewenangan organisasi berpotensi menghasilkan *sectoral performance success* tanpa menyediakan mekanisme yang cukup untuk menjelaskan bagaimana satu capaian berkontribusi terhadap capaian lainnya. Kinerja pembangunan

daerah karena itu membutuhkan integrasi vertikal antara tujuan dan outcome sekaligus integrasi horizontal antara fungsi investasi, ketenagakerjaan, kewirausahaan, perdagangan, dan perencanaan pembangunan.

Perspektif strategic public management menegaskan bahwa strategi sektor publik perlu menghubungkan perencanaan, implementasi, pengukuran kinerja, dan pembelajaran secara berkelanjutan agar sasaran organisasi tidak berhenti sebagai komitmen formal (Poister, 2010). Desain sistem pengukuran kinerja juga menentukan kemampuan organisasi sektor publik untuk menghubungkan formulasi strategi dengan penggunaan informasi kinerja dalam proses implementasi dan evaluasi (Johnsen et al., 2024). Kolaborasi antar organisasi menjadi semakin penting ketika formulasi strategi membutuhkan kontribusi dari berbagai aktor yang memiliki sumber daya dan kewenangan berbeda dalam mencapai tujuan publik bersama (Hong & Jimenez, 2024). *Kerangka policy integration* menunjukkan bahwa keselarasan lintas sektor harus diperiksa melalui *keterhubungan policy frame*, keterlibatan subsistem, tujuan kebijakan, dan instrumen kebijakan, karena peningkatan integrasi pada satu dimensi tidak menjamin integrasi pada dimensi lainnya (Candel & Biesbroek, 2016). Bukti spesifik Kota Banjar mengenai keterbatasan koordinasi antar perangkat daerah, promosi investasi yang masih pasif, dan layanan aftercare yang belum terstruktur semakin memperkuat pentingnya integrasi kelembagaan dalam menerjemahkan strategi investasi menjadi hasil pembangunan yang berkelanjutan (Nulhakim et al., 2025).

Sintesis temuan membentuk *Integrated Strategic Performance Alignment* sebagai konfigurasi yang menghubungkan strategic intent, arsitektur target, implementasi kebijakan, realisasi investasi, intermediate outcomes, hasil ekonomi lokal, dan pembelajaran strategis dalam satu sistem kinerja pemerintah daerah. Keselarasan pada tahap awal terjadi ketika prioritas pembangunan diterjemahkan ke dalam target dan indikator yang konsisten, sedangkan keselarasan pada tahap berikutnya bergantung pada kemampuan kebijakan dan sumber daya menghasilkan output sesuai arah strategis. Realisasi investasi menempati *posisi sebagai intermediate performance output* yang belum dapat dikategorikan sebagai keberhasilan akhir sebelum keterhubungannya dengan kewirausahaan, ketenagakerjaan, dan hasil ekonomi dapat diidentifikasi secara memadai. Policy integration berfungsi sebagai mekanisme horizontal yang menghubungkan perangkat daerah sepanjang rantai tersebut, sementara informasi kinerja dan pembelajaran strategis membentuk mekanisme umpan balik yang memungkinkan pemerintah mengoreksi target, instrumen, dan implementasi. Kerangka ini menghasilkan tiga kondisi *diagnostik—aligned, partially aligned, dan disconnected—* yang memungkinkan kinerja pembangunan dinilai berdasarkan kualitas hubungan antar tahapan, bukan sekadar berdasarkan pencapaian indikator sektoral secara terpisah.

Gambar 1. Kerangka Keselarasan Kinerja Strategis Terintegrasi untuk Pembangunan Ekonomi Lokal



Sumber: Konseptualisasi penulis.

Sumber: konseptualisasi penulis berdasarkan integrasi manajemen publik strategis, manajemen kinerja strategis, integrasi kebijakan, dan temuan empiris Kota Banjar.

Kerangka tersebut menempatkan keberhasilan strategi pembangunan ekonomi sebagai kemampuan pemerintah menjaga konsistensi hubungan sejak penetapan prioritas hingga terbentuknya manfaat ekonomi publik. Realisasi investasi tetap penting sebagai indikator kinerja, tetapi kedudukannya lebih tepat sebagai keluaran antara yang perlu diterjemahkan melalui kapasitas kewirausahaan, pembentukan pekerjaan, dan perubahan ekonomi lokal. Ketidaksambungan pada satu tahapan tidak selalu menunjukkan kegagalan keseluruhan strategi, tetapi menjadi sinyal bahwa koordinasi, indikator, instrumen, atau mekanisme umpan balik memerlukan penyesuaian. Kota Banjar menunjukkan *kondisi partial strategic alignment* karena orientasi strategis dan sejumlah outcome bergerak positif, sementara hubungan antara target investasi, realisasi, kualitas pekerjaan, dan hasil ekonomi belum membentuk lintasan yang sepenuhnya proporsional dan terintegrasi. Temuan tersebut menegaskan bahwa kualitas manajemen strategis daerah ditentukan bukan hanya oleh kemampuan mencapai target investasi, tetapi oleh kapasitas pemerintah untuk menerjemahkan target tersebut menjadi *integrated public outcomes* secara konsisten.

E. SIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa *strategic performance alignment* pembangunan ekonomi Kota Banjar masih bersifat parsial karena arah strategis investasi telah ternormalisasi, tetapi keterhubungan antara target, realisasi investasi, ketenagakerjaan, kewirausahaan, dan hasil ekonomi lokal belum membentuk *rantai target–output–outcome* yang sepenuhnya konsisten. Temuan ini menegaskan adanya *Investment–Outcome Translation Gap* yang menunjukkan bahwa capaian investasi tidak dapat diperlakukan sebagai indikator akhir keberhasilan pembangunan tanpa menilai kemampuan pemerintah menerjemahkannya menjadi manfaat ekonomi publik yang lebih luas. Tujuan penelitian tercapai melalui identifikasi titik keselarasan dan keterputusan kinerja, sekaligus menghasilkan kontribusi berupa *Integrated Strategic Performance Alignment Framework* yang menempatkan integrasi kebijakan, penggunaan informasi kinerja, dan pembelajaran strategis sebagai penghubung antara *investasi dan local economic outcomes*. Pemerintah Kota Banjar perlu memperkuat integrasi

sasaran, indikator outcome, mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah, serta penggunaan informasi kinerja bersama agar agenda investasi lebih terarah pada penciptaan pekerjaan berkualitas, penguatan kewirausahaan, dan transformasi ekonomi lokal. Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan data sekunder dan perbedaan definisi indikator antara sumber, sehingga penelitian lanjutan perlu memadukan data longitudinal dengan wawancara aktor strategis dan analisis lintas daerah untuk menguji *mekanisme investment-to-outcome translation* secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Axelsson, K., & Höglund, L. (2024). Strategic management in the public sector: The case of the Swedish Transport Administration. *International Public Management Journal*, 27(4), 609–632. <https://doi.org/10.1080/10967494.2023.2271481>
- Badan Pusat Statistik. (2025, November 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen: Rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/11/05/2479/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-85-persen--rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-33-juta-rupiah-.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Banjar. (2024, May 15). Keadaan ketenagakerjaan Kota Banjar Agustus 2023. Badan Pusat Statistik Kota Banjar. <https://banjarkota.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/15/148/keadaan-ketenagakerjaan-kota-banjar-agustus-2023.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Banjar. (2025, December 18). Keadaan ketenagakerjaan Kota Banjar Agustus 2025. Badan Pusat Statistik Kota Banjar. <https://banjarkota.bps.go.id/id/pressrelease/2025/12/18/176/keadaan-ketenagakerjaan-kota-banjar-agustus-2025.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Banjar. (2026, April 6). Produk domestik regional bruto Kota Banjar menurut lapangan usaha 2021–2025. Badan Pusat Statistik Kota Banjar. <https://banjarkota.bps.go.id/id/publication/2026/04/06/7b1658d8f60b56e244e4430f/produk-domestik-regional-bruto-kota-banjar-menurut-lapangan-usaha-2021-2025.html>
- Berman, E. M., Prasojo, E., Fathurrahman, R., Samartini, A., Plimmer, G., Sabharwal, M., ... Ferdiansyah, J. (2025). Strategic program management: Performance accountability driving use in national governments. *Public Administration Review*, 85(3), 862–884. <https://doi.org/10.1111/puar.13892>
- Bourdin, S., Destefanis, S., Coppola, G., & Kubara, M. (2025). What are the impacts of Cohesion Policy on the trade-off between employment and productivity? *Regional Studies*, 59(1), 2379444. <https://doi.org/10.1080/00343404.2024.2379444>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Candel, J. J. L., & Biesbroek, R. (2016). Toward a processual understanding of policy integration. *Policy Sciences*, 49, 211–231. <https://doi.org/10.1007/s11077-016-9248-y>
- Chen, Y., Hu, J., Du, Y., & Zhan, C. (2024). FDI deregulations and employment. *China Economic Quarterly International*, 4(4), 281–292. <https://doi.org/10.1016/j.ceqi.2024.12.002>
- Fabra, N., Gutiérrez, E., Lacuesta, A., & Ramos, R. (2024). Do renewable energy investments create local jobs? *Journal of Public Economics*, 239, 105212. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2024.105212>
- Gehrke, E., Genthner, R., & Kis-Katos, K. (2025). Regulating manufacturing FDI: Local labor market responses to a protectionist policy in Indonesia. *Journal of Development Economics*, 177, 103563. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2025.103563>

- Hong, M., & Jimenez, B. S. (2024). Strategy formulation process and interorganizational collaboration. *Public Performance & Management Review*, 47(5), 1228–1262. <https://doi.org/10.1080/15309576.2024.2366238>
- Johnsen, Å., Solholm, K., & Tufte, P. A. (2024). Performance measurement system design as link between strategy formulation and performance information use in public sector organizations. *Public Performance & Management Review*, 47(4), 813–848. <https://doi.org/10.1080/15309576.2024.2360158>
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2026, January 15). Realisasi investasi 2025 lampau target, hilirisasi melompat 43,3 persen. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. <https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/realisasi-investasi-2025-lampau-target-hilirisasi-melompat-43-3-persen>
- Kurnianto, S., Fanani, Z., Prasetyo, K., Utama, A. A. G. S., Nikma, L. F., & Muzayyana, K. N. (2026). Boosting the effectiveness of performance management systems and performance of public organizations: Insights from Indonesia. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 1–21. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-12-2024-0852>
- Luu, T. D., Huynh, T. T., & Phung, T. T. (2024). Integrating of FDI, institutions, ICT and logistics for promoting domestic entrepreneurship: Evidence from fsQCA. *Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship*, 26(3), 441–458. <https://doi.org/10.1108/JRME-07-2023-0120>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE.
- Nulhakim, A. L., Arumi S, I. S., Hilda, N., Maghfirotn, S. W., & Sudrajat, B. (2025). Peran DPMPTSP Kota Banjar dalam menarik dan mengembangkan penanaman modal di daerah. *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(6), 951–964. <https://doi.org/10.62387/naafi.v1i6.298>
- Pemerintah Kota Banjar. (2024). Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar tahun 2024–2026. Pemerintah Kota Banjar. <https://ppid.banjarkota.go.id/portal/system/public/uploads/informasi/1714635313.pdf>
- Pemerintah Kota Banjar. (2025). Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjar tahun 2025. Pemerintah Kota Banjar. <https://ppid.banjarkota.go.id/portal/system/public/uploads/informasi/1756096229.pdf>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Poister, T. H. (2010). The future of strategic planning in the public sector: Linking strategic management and performance. *Public Administration Review*, 70(S1), S246–S254. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2010.02284.x>
- Rivenbark, W. C. (2025). The shift from performance measurement to performance management in local government: Do performance measurement systems support the drivers of performance data use? *International Journal of Public Sector Management*, 38(3), 368–385. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-12-2023-0356>
- Vandersmissen, L., & George, B. (2024). Strategic planning in public organizations: Reviewing 35 years of research. *International Public Management Journal*, 27(4), 633–658. <https://doi.org/10.1080/10967494.2023.2271901>
- Vandersmissen, L., George, B., & Voets, J. (2024). Strategic planning and performance perceptions of managers and citizens: Analysing multiple mediations. *Public Management Review*, 26(2), 514–538. <https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2103172>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.).

SAGE.